

BAB IV

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KOREA UTARA PADA MASA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP

4.1 Kebijakan Keamanan dari Pemerintahan Donald Trump

"*America First*" - keamanan ekonomi, nuklir, ruang dan kapasitas dunia maya sebagai imbalan dari kompetisi geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar. Penjelasan di awal kalimat tadi adalah Strategi Keamanan Nasional terbaru yang dibuat oleh Administrasi Amerika Serikat yang mengintegrasikan kebijakan luar negeri, pertahanan nasional, hubungan ekonomi internasional, dan kebijakan bantuan pembangunan. Secara teori, jenis dokumen *National Security Strategy* (Strategi Keamanan Nasional) ini dianggap sebagai puncak dari proses konsultatif birokrasi dan antarlembaga yang kompleks di mana setiap entitas yang berpartisipasi menetapkan serangkaian tujuan dan prioritas untuk berkontribusi pada keamanan nasional. Selain itu, dokumen ini juga mendefinisikan kosakata umum untuk semua pihak yang diberi mandate untuk melaksanakan strategi seperti yang telah ditetapkan, merancang dan mengejar sub-strategi serta rencana-rencana tertentu, serta membahas hal-hal terkait dengan alokasi anggaran yang konkret dan karenanya didasarkan pada sumber daya yang tersedia. Seiring berjalannya waktu, dokumen-dokumen ini menjadi semakin tidak relevan karena menjadi kurang tepat, klise, dan terlalu ambisius. Strategi-strategi tersebut cenderung mengidentifikasi terlalu banyak prioritas (dan karenanya tidak menetapkan prioritas yang jelas) tanpa melihat satu kendala utama seperti sumber daya (yaitu, anggaran yang telah tersedia oleh pemerintah federal untuk mengimplementasikan agenda strategis). Tujuan strategis yang ditetapkan dalam dokumen

tersebut tidak memiliki arti yang nyata sampai mereka dikaitkan dengan (dan didukung oleh) sarana militer, ekonomi dan diplomatik yang diperlukan. Maka dari itu. Perencanaan harusnya berjalan secara paralel dengan evaluasi kapasitas yang realistis.

Dalam dokumen terbaru yang dibuat oleh pemerintahan Donald Trump, dokumen tersebut bisa dikatakan sebagai “sebuah kejutan”. Mengapa demikian? Di satu sisi, itu adalah salah satu dokumen NSS terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat - hampir dua kali lipat panjangnya jika dibandingkan dengan versi tahun 2015. NSS terbaru ini berjumlah 68 halaman, sedangkan NSS yang dibuat pada tahun 2015 berjumlah 32 halaman. Dokumen ini juga diterbitkan sebelum tahun pertama pemerintahan berakhir. Hal ini adalah momen yang selalu diinginkan tetapi biasanya tidak mungkin terjadi mengingat kesulitan yang ada pada proses pembuatannya. Namun, terlepas dari kredibilitas HR McMaster, Dina Powell, Nadia Schadlow dan Seth Center selaku perancang dokumen NSS tersebut, keraguan muncul tentang seberapa banyak koordinasi antar-lembaga berlangsung selama persiapan pembuatan NSS ini (mengingat jumlah waktu yang biasanya terlibat di masa lalu, tetapi juga karena dengan kompleksitas skenario internasional pada masa itu). Tetapi, ini bukan satu-satunya keraguan. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh tim yang menyusun strategi keamanan nasional adalah fakta bahwa bahannya terlalu sedikit untuk dikerjakan: tidak ada dokumen atau catatan yang diberikan oleh Trump sebelumnya mengenai keamanan nasional. Selain itu, transisi presiden yang terjadi pada saat ini terlalu kacau-balau dan dalam pidato pelantikannya, Trump menawarkan gambaran 'America First' yang terlalu gelap. Presentasi dokumen NSS yang terbaru pun dianggap tidak biasa. Laporan menyebutkan bahwa dokumen NSS tersebut dibuat sendiri oleh Presiden - sesuatu yang biasanya tidak dilakukan. Untuk beberapa alasan, Trump ingin

memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan secara langsung terkait dengan kebijakan yang ia buat dan diharapkan dapat sejalan dengan strategi baru. Namun ternyata, itu semua tidak lebih dari pidato kampanye di mana Trump menyampaikan daftar pencapaian tahun pertamanya sebagai Presiden dan kritik lain dari pemerintahan sebelumnya⁴³. Tidak adanya kesinambungan antara apa yang dikatakan Trump dan apa yang terkandung dalam NSS diakibatkan adanya masalah yang dihadapi penasihatnya dalam membangun kerangka kerja intelektual untuk naluri "America First" Trump dan mengubahnya menjadi doktrin kebijakan luar negeri. Kata-katanya untuk Cina dan Rusia disampaikannya dengan sangat lembut. Meskipun mereka mewakili musuh yang potensial, Trump menegaskan bahwa ia akan mencari peluang untuk berkolaborasi dengan mereka, dan bahkan Trump berterima kasih kepada Vladimir Putin untuk beberapa gerakan yang kurang signifikan. Namun demikian, dokumen NSS ini jauh lebih sulit untuk diterima sehubungan dengan negara-negara yang disebutkan oleh Trump yaitu Cina dan Rusia; kedua negara tersebut mengklaim bahwa tujuan mereka adalah untuk mengubah dunia dengan cara yang menentang nilai-nilai dan kepentingan Amerika Serikat⁴⁴. Meskipun demikian, Trump menekankan bahwa pemerintahannya akan memfokuskan pada permasalahan denuklirisasi yang telah gagal dilaksanakan sebelumnya.

Pada akhirnya, NSS baru ini merupakan campuran budaya tradisional keamanan nasional AS dengan banyak konsep Partai Republik murni, tetapi juga mencakup sudut-sudut yang unik dari seorang Donald Trump. Ini jelas terlihat

⁴³ CNN. (2018, December 18). Retrieved from YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=j1XL4nUHMIY>

⁴⁴ (2017). *National Security Strategy*, 25.

dari penekanan pada Cina, Rusia, Iran dan Korea Utara, dan pada ancaman transnasional seperti terorisme, yang mau tidak mau mengingat kembali strategi keamanan nasional Amerika Serikat pada masa pemerintahan sebelumnya. Dokumen ini juga mempertahankan referensi abadi untuk peran kepemimpinan tradisional AS di dunia; dan komitmen teguh untuk mencegah intervensi global yang akan melibatkan sejumlah biaya untuk berbagai kepentingan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pada titik ini, komponen strategi keamanan nasional yang disusun oleh pemerintahan Donald Trump menunjukkan kesinambungan tertentu yang telah dipertahankan Amerika Serikat selama beberapa dekade terakhir. Penekanan pada pertahanan anti-rudal, senjata nuklir dan masalah ekonomi tertentu seperti reformasi pajak dan deregulasi adalah hal baru, tetapi semua masalah ini merupakan bagian dari platform utama Partai Republik. Namun, fokus pada keamanan perbatasan, batas imigrasi, dan kebijakan perdagangan, bersama dengan tidak adanya kekhawatiran terhadap perubahan iklim dan refrain “*America First*” adalah elemen strategi keamanan nasional dari pemerintahan Trump yang paling baru dan jelas untuk dilaksanakan.

4.2 Nuklir pada Masa Pemerintahan Trump

Pada masa pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat kembali berinvestasi dalam memelihara persenjataan dan infrastruktur nuklirnya, dimana dokumen NSS yang terbaru memberikan peran sentral terhadap permasalahan satu ini. Senjata nuklir telah memainkan peran pencegahan yang penting sejak akhir Perang Dunia Kedua, memungkinkan untuk terjadinya konfrontasi antara kekuatan besar - jika tidak semua konflik - harus dihindari. Akan tetapi seiring berjalannya waktu (terutama sejak akhir Perang Dingin), Amerika Serikat telah tertinggal jauh dalam program-program modernisasi, sementara musuh-musuh lain seperti Rusia, Cina, Iran dan Korea Utara telah membuat kemajuan yang signifikan. Jumlah dan jenis

senjata nuklir yang ada di gudang senjata Amerika Serikat telah turun secara signifikan dalam 40 tahun terakhir. NSS & Nuclear Posture Review yang diterbitkan pada bulan Februari 2018 bersikeras mempertahankan pencegah nuklir yang aman dan efektif, melakukan modernisasi dan jika diperlukan, mengganti trias strategis kapal selam nuklir, pembom strategis dan rudal balistik antarbenua. Tapi masalahnya, bukan hanya peningkatan numerik tetapi juga peran senjata nuklir itu sendiri. Perlu dipahami bahwa kembali ke kompetisi kekuatan besar akan meningkatkan ketergantungan serta kepentingan mereka. Pada tahun 2010, Pemerintahan Obama menyetujui Tinjauan Postur Nuklir terbaru yang bertujuan tidak hanya mengurangi jumlah senjata nuklir dan melepaskan akumulasi yang baru, tetapi juga memainkan peran dalam Strategi Keamanan Nasional serta membatasi kondisi di mana mereka dapat digunakan. Barack Obama menetapkan bahwa satu-satunya tujuan dari adanya senjata ini adalah untuk mencegah serangan nuklir terhadap Amerika Serikat, sekutunya, dan pasukan militer Amerika Serikat sendiri. Tujuan tersirat yang berusaha disampaikan oleh Obama adalah bahwa dengan penggunaan cara ini, negara-negara lain juga akan mengurangi secara paralel minat mereka untuk memiliki kapasitas nuklir mereka sendiri dan meninggalkan ambisi untuk memiliki senjata nuklir. Iran dan Korea Utara berada di pusat agenda non-proliferasi Obama, yang meyakinkan Rusia dan China untuk bekerja sama dalam pengendalian senjata dan untuk menjatuhkan sanksi yang disetujui dan didukung oleh Dewan Keamanan. Namun demikian, perspektifnya agak terbatas dan secara umum, perubahan dalam struktur pasukan AS dan doktrin mereka tidak memiliki konsekuensi yang signifikan di seluruh dunia, kecuali untuk perjanjian nuklir dengan Iran. Perjanjian dengan Iran sendiri dibuat pada tahun 2015 melalui satu persetujuan yang disebut dengan *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*. Persetujuan tersebut menyebutkan bahwa diperlukan kendala yang berupaya memastikan bahwa program nuklir Iran dapat

digunakan untuk tujuan damai murni dengan imbalan pengangkatan luas Amerika Serikat, Uni Eropa (UE), dan sanksi PBB terhadap Iran. Akan tetapi, pada bulan Mei tahun 2016 pemerintahan Trump menyatakan keluar dari persetujuan tersebut. Pejabat Administrasi Trump berpendapat bahwa JCPOA tidak cukup untuk memenuhi kepentingan Amerika Serikat menarik karena bantuan sanksi luas yang diberikan di bawah perjanjian dapat membuat Iran memperoleh tambahan sumber daya untuk melakukan "kegiatan memfitnah" di wilayah tersebut, dan tidak membatasi pengembangan Iran rudal balistik. Resolusi 2231, yang diadopsi pada Juli 2015 melarang transfer senjata ke atau dari Iran, tetapi pembatasan tersebut hanya berlangsung selamase lama lima tahun, dan berisi pembatasan sukarela atas pengembangan rudal balistik berkemampuan nuklir Iran hanya untuk delapan tahun. Presiden Trump pada akhirnya mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi berpartisipasi dalam JCPOA dan akan memberlakukan kembali sanksi yang telah ditangguhkan sesuai dengan perjanjian tersebut. Kekuatan lain yang menegosiasikan perjanjian dengan Iran seperti Rusia, Cina, Prancis, Inggris, dan Jerman menentang keputusan yang dibuat oleh Amerika Serikat dan mereka mengkalim telah bertemu dengan para pejabat Iran untuk melanjutkan pengimplementasian JCPOA. Presiden Iran Hassan Rouhani pun telah berjanji untuk melanjutkan implementasi dari perjanjian tersebut, asalkan Iran terus menerima manfaat ekonomi dari persetujuan yang telah disepakati tersebut⁴⁵.

Di bawah Administrasi Trump, terdapat fokus yang berbeda terkait tentang permasalahan ini. Senjata nuklir hanya akan digunakan dalam 'keadaan ekstrem', tetapi sekarang dapat

⁴⁵ Kerr, P. K., & Katzman, K. (2018). *Iran Nuclear Agreement and U.S. Exit*. Washington: Congressional Research Service.

mencakup serangan strategis non-nuklir terhadap penduduk sipil, serangan terhadap infrastruktur kritis dan agresi konvensional dalam skala besar. Disaat Obama berjanji untuk tidak membangun senjata nuklir yang baru, Trump telah merehabilitasi rudal jelajah pelayaran berbasis di laut serta melakukan pembangunan senjata nuklir taktis berkekuatan rendah. Semua ini berorientasi pada peran yang berkembang dari opsi-opsi yang ada - terutama kebijakan de-eskalasi; dalam doktrin militer Rusia, pelanggaran Moskow terhadap Perjanjian Angkatan Nuklir Jangka Menengah, dan meningkatnya kapasitas nuklir China dan Korea Utara bersamaan dengan adanya kemungkinan terorisme yang melibatkan kekuatan nuklir. Dengan cara ini, publikasi Tinjauan Postur Nuklir yang baru dibenarkan sebagai tanggapan yang diperlukan terhadap perubahan kondisi keamanan global saat ini. Presiden-presiden sebelumnya lainnya (tidak hanya Obama) juga telah berusaha untuk semakin tidak bergantung pada jenis senjata ini, mengakui utilitasnya yang terbatas dan alih-alih berfokus pada keunggulan komparatif Amerika Serikat dalam peperangan konvensional berteknologi tinggi. Untuk mengarahkan persaingan menuju senjata nuklir di mana militer Amerika Serikat sendiri pun tidak memiliki keunggulan komparatif yang sama seperti sebelumnya, bagaimanapun, tampaknya hal ini bukan suatu kebijakan yang paling memadai.

Namun, dalam dokumen NSS yang terbaru, ada peringatan penting yang relevan untuk menghindari kemungkinan konfrontasi nuklir: 'Untuk menghindari kesalahan perhitungan, Amerika Serikat akan melakukan diskusi dengan negara-negara lain untuk membangun hubungan yang dapat diprediksi dan mengurangi risiko nuklir. Kami akan mempertimbangkan pengaturan pengendalian senjata baru jika mereka berkontribusi terhadap stabilitas strategis dan jika mereka dapat diverifikasi'. Dialog dengan China dan Rusia untuk menghindari kesalahan perhitungan seperti yang

dijelaskan sebelumnya dan untuk memperkuat stabilitas strategis tampaknya menjadi prioritas paling intuitif, dan postur ini telah dikonfirmasi dalam Tinjauan Postur Nuklir Januari 2018. Bukti dari hal ini adalah kembalinya Moskow ke Perjanjian INF, terutama jika Rusia siap untuk memperpanjang Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis di luar batas waktu pada tahun 2021.

4.3 Strategi Pemerintahan Trump untuk Menghadapi Korea Utara

Jika kita berbicara tentang penerapan strategi Presiden Donald Trump terhadap Korea Utara, tentunya hal ini berkaitan langsung dengan kebijakan pertahanan yang diterapkan oleh Trump sendiri. Kebijakan pertahanan Presiden Trump ke Asia didasarkan pada konsep *offshore balancing* - yaitu kebijakan pertahanan yang didasarkan pada aliansi regional negara-negara sahabat yang didukung oleh matra Angkatan Laut Amerika dalam merespon munculnya kekuatan yang membahayakan kepentingan Amerika. Kebijakan ini menggambarkan komitmen Trump atas kebijakan dalam negerinya dengan tetap mempertahankan pengaruh globalnya. Bicara soal pandangan Trump terhadap kondisi Semenanjung Korea, ia menyatakan pada pidato kenegaraan pertamanya di depan Kongres Amerika pada awal 2018 lalu dimana ia menyinggung situasi di Semenanjung Korea. Presiden Trump menggambarkan Pemerintah Korea Utara sebagai rejim otoriter yang secara brutal menindas rakyatnya dan membahayakan keamanan rakyat Amerika⁴⁶.

⁴⁶ Siswanto. (2018). Jurnal Penelitian Politik: Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas Antar Bangsa. *Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia*, 56-67.

Sejak Presiden Donald Trump menduduki jabatannya pada tanggal 20 Januari 2017, Korea Utara terus melanjutkan provokasinya dengan melancarkan enam pengujian nuklir serta melakukan beberapa pengujian rudal balistik sampai bulan September, termasuk meluncurkan dua rudal balistik antarbenua dengan tipe Hwasong-14. Dalam beberapa pengujian tersebut, pada bulan Juli 2017 untuk pertama kalinya, rudal balistik tersebut berhasil mencapai daratan Amerika Serikat dan dilakukan pula pengujian dalam jarak menengah pada bulan Mei dan Agustus. Dalam menghadapi provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut, pemerintahan Donald Trump pun telah mempersiapkan sebuah strategi baru yang akan diterapkan untuk menghadapi Korea Utara. Sementara strategi baru dipersiapkan, pemerintahan Donald Trump pun mengambil langkah defensif dalam menghadapi provokasi-provokasi yang terus digencarkan.

Setelah menyelesaikan masa review selama dua bulan, pada pertengahan April 2017 pemerintahan Donald Trump menetapkan sebuah kebijakan baru terhadap Korea Utara yang dikenal dengan nama “*strategic accountability*” (akuntabilitas strategis), dimana kebijakan baru ini memusatkan pada “pemberian tekanan dan keterlibatan secara maksimal” terhadap denuklirisasi rezim komunis. Dalam kebijakan baru ini, para pembuat kebijakan Amerika Serikat telah mempertimbangkan bahwa pengembangan dari senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan “ancaman keamanan nasional yang darurat dan prioritas utama dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat”. Lebih lanjut lagi, mereka menjelaskan bahwa tujuan akhir dari kebijakan baru Amerika Serikat terhadap Korea Utara ini adalah untuk mencapai “denuklirisasi yang dapat diverifikasi, selesai secara menyeluruh, dan tidak dapat terulang kembali di Semenanjung

Korea serta menghentikan rezim yang berkuat dengan program rudal balistik-nya”⁴⁷. Pernyataan kebijakan ini dimaksudkan untuk menghapus kemungkinan atau kekhawatiran bahwa tujuan kebijakan Washington dapat berubah menjadi hanya satu saja, yaitu hanya sekedar menghentikan atau membekukan program nuklir dan rudal Korea Utara. Komponen dari kebijakan akuntabilitas strategis sendiri diantaranya adalah:

- memperkuat tekanan terhadap Korea Utara melalui sanksi ekonomi baik secara unilateral maupun multilateral;
- tidak melakukan perubahan kebijakan dari rezim yang ada dengan menggunakan kekuatan militer;
- membangun hubungan yang baik secara aktif dengan Cina untuk memperkuat tekanan yang diberikan ke Korea Utara;
- memperkuat kesiapan militer Amerika Serikat melalui kerja sama yang baik dengan Jepang dan Korea Utara untuk menghadapi provokasi Korea Utara; dan
- mencari keterlibatan yang memungkinkan bagi Amerika Serikat dengan rezim komunis

Pada penjabaran sebelumnya, kebijakan ini disebut menetapkan “pemberian tekanan secara maksimal” melalui

⁴⁷ Bunker, T. (2017, August 14). *NEWSMAX*. Retrieved from <https://www.newsmax.com/:https://www.newsmax.com/politics/rex-tillerson-john-mattis-north-korea-wall-street-journal/2017/08/14/id/807488/>

sanksi ekonomi terhadap Pyongyang untuk menghentikan tindakan provokasi yang terus mereka lakukan dan memaksa mereka untuk kembali ke meja negosiasi. Fokus utama dalam “pemberian tekanan secara maksimal” ini didasarkan pada adanya peningkatan sanksi baik secara unilateral maupun multilateral yang dimana penerapan sanksi tersebut sejalan dengan paham realis untuk menghadapi rezim dari pihak lawan – yaitu diplomasi wortel dan tongkat – yang bertujuan untuk mengubah sifat mereka yang sulit untuk diajak bekerja sama serta menghentikan provokasi-provokasi yang gencar dilakukan. Diplomasi wortel dan tongkat itu sendiri merupakan salah satu bentuk diplomasi koersif, dimana diplomasi ini merupakan strategi diplomatik khusus yang menggunakan ancaman kekuatan untuk membuat musuh menghentikan tujuan atau membalikkan suatu tindakan. Istilah paksaan ini mengacu pada upaya untuk mengubah perilaku aktor tanpa menggunakan kekerasan atau menggunakan kekuatan terbatas. Melalui kebijakan ini, pada tanggal 3 Agustus 2017, Presiden Donald Trump menandatangani RUU untuk memperkuat sanksi terhadap Korea Utara, sama seperti yang dilakukannya terhadap Rusia dan Iran. Sanksi ini juga menargetkan pada pihak-pihak yang membantu Korea Utara dalam usaha pengembangan program nuklir dan misilnya. RUU terbaru ini juga melarang kapal-kapal yang dimiliki oleh pemerintahan Korea Utara atau negara mana pun yang tidak mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk berlabuh di Amerika Serikat dan melarang barang-barang yang diproduksi para pekerja dari Korea Utara di luar negeri untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat⁴⁸.

⁴⁸ Si-soo, P. (2017, August 3). *North Korea*. Retrieved from The Korea Times: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/08/103_234105.html

Selain itu, pemerintahan Trump juga menekankan pada pemberian sanksi multilateral melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghadapi Korea Utara. Secara resmi, Amerika Serikat telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka akan melanjutkan untuk membentuk satu kesatuan internasional pada masalah Korea Utara melalui peningkatan keterlibatan di ranah PBB, forum diplomasi regional, dan negara-negara lain di seluruh dunia. Di bawah kebijakan ini, Washington mengarahkan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi Resolusi 2371 pada 5 Agustus untuk memberlakukan sanksi hukuman yang lebih berat pada rezim komunis sebagai respon atas dua pengujian ICBM pada bulan Juli. Ketentuan resolusi termasuk larangan untuk ekspor batu bara, besi, bijih besi, timbal, bijih timah, dan makanan laut yang akan mengurangi pendapatan ekspor tahunannya. Resolusi ini juga melarang negara-negara lain untuk meningkatkan jumlah pekerja yang berasal dari Korea Utara maupun membuka kerjasama baru dengan negara komunis ini dalam bentuk investasi apapun. Dalam penjelasan lebih lanjut, sebenarnya apa yang dilakukan Amerika Serikat bertujuan untuk diadakannya kembali negosiasi tentang denuklirisasi. Meskipun demikian, sanksi baru yang berlaku tidak termasuk pengurangan atau larangan apa pun pada ekspor minyak mentah ke Korea Utara terutama dari China, yang dilaporkan tampaknya merupakan kompromi yang dihasilkan dari perundingan Cina-AS tentang ruang lingkup sanksi yang diberikan kepada Korea Utara.

Sebagai reaksi yang sigap atas uji coba nuklir ke-enam dari Korea Utara pada tanggal 3 September yang dikabarkan merupakan nuklir terkuat yang mereka miliki dan adanya kemungkinan bahwa terdapat bom hidrogen dalam pengujian tersebut, pada tanggal 11 September pemerintahan Trump

berinisiatif untuk menerapkan Resolusi 2375 dari Dewan Keamanan PBB yang berisi sanksi paling ketat yang pernah dikenakan pada rezim komunis. Resolusi ini melarang ekspor semua cairan gas alam dan kondensat ke Korea Utara dan mencegah negara lain untuk mengekspor minyak mentah ke negara tersebut lebih dari jumlah saat ini, yaitu 4 juta barel per tahun. Selain itu, resolusi ini juga membatasi impor produk petroleum olahan menjadi 2 juta barel per tahun yang setara dengan 45% dari volume impor tahunan saat ini. Jika resolusi ini dijalankan sepenuhnya, maka sanksi-sanksi yang diterapkan akan mengurangi sekitar 30% dari keseluruhan pasokan minyak ke Korea Utara. Sebagai tambahan, resolusi ini juga melarang semua kegiatan ekspor dari produk tekstil Korea Utara yang masuk ke urutan terbesar kedua dalam kategori ekspor negara tersebut serta melarang negara-negara lain memberikan otorisasi kerja baru kepada warga Korea Utara. Resolusi ini juga melarang usaha gabungan apapun dengan Korea Utara dan akan menutup segala jenis kegiatan usaha yang berafiliasi dengan negara tersebut selama 120 hari⁴⁹.

Sanksi yang diterapkan pada resolusi terbaru ini terasa lebih singkat jika dibandingkan dengan rancangan resolusi yang dibuat oleh Amerika Serikat. Pemerintah AS melakukan embargo minyak skala penuh terhadap Korea Utara dan pembekuan aset internasional pada pemimpinnya, Kim Jong-un dan saudara perempuannya Yo-jong, sebagai bagian dari sanksi baru. Namun, tindakan tersebut pada akhirnya dikeluarkan dari resolusi yang telah final dalam rangka memenangkan dukungan China dan Rusia yang sebelumnya menentang mereka. Dalam proses negosiasi multilateral di PBB, Amerika Serikat

⁴⁹ Council, S. (2017). *Resolution 2375*. United Nation.

sepertinya berkompromi dengan dua rekannya untuk memastikan apakah resolusi tersebut benar-benar diterapkan dengan baik. Efektivitas sanksi baru sangat bergantung pada seberapa kuat dan ketatnya Cina dalam menerapkannya secara utuh. Di sisi lain, Presiden Trump pada 21 September mengumumkan perintah eksekutif baru yang mengotorisasi Departemen Keuangan AS untuk menjatuhkan sanksi pada individu dan entitas yang melakukan bisnis dengan Korea Utara. Perintah baru tersebut berisi ketentuan untuk:

1. Menjatuhkan sanksi pada lembaga keuangan asing yang melakukan atau memfasilitasi transaksi signifikan yang terhubung dengan perdagangan bersama Korea Utara;
2. Memperluas sanksi kepada individu yang terlibat dalam konstruksi, energi, jasa keuangan, perikanan, teknologi informasi, manufaktur, industri medis, pertambangan, tekstil, atau transportasi di Korea Utara; dan
3. Melarang kapal dan pesawat yang mengunjungi Korea Utara untuk memasuki AS selama kurun waktu 180 hari.

Perintah eksekutif ini dianggap sebagai sanksi unilateral yang paling kuat yang pernah diterapkan untuk melawan rezim komunis dimana resolusi ini menargetkan pada sektor ekonominya yang mendukung program nuklir dan misil mereka. Sebagai tindakan pertama untuk melaksanakan perintah yang telah ditetapkan, pada tanggal 26 September Departemen Keuangan menunjuk delapan bank Korea Utara dan dua puluh enam orang Korea Utara yang bekerja di Cina, Rusia, Libya dan Uni Emirat Arab sebagai target sanksi tambahan. Langkah ini diambil sebagai langkah awal untuk mencegah lembaga keuangan asing dari kegiatan transaksi dengan bank-bank Korea Utara yang dapat mengisolasi mereka dari sistem keuangan internasional. Hukuman tersebut juga mencerminkan jangkauan jaringan keuangan Korea Utara

meskipun ada sejumlah pembatasan yang sudah diberlakukan pada negara itu oleh Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas pengujian yang telah dilakukan dan Dewan Keamanan menyatakan bahwa terdapat jaringan yang ilegal⁵⁰. Selain itu, pada 20 November Presiden Trump kembali menempatkan Korea Utara ke daftar negara yang mendukung terorisme dalam gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap mereka. Seperti yang ditentukan dalam daftar, rezim Kim akan menghadapi empat jenis sanksi AS:

- a. melarang ekspor dan penjualan terkait senjata;
- b. kontrol atas ekspor barang-barang penggunaan ganda;
- c. larangan bantuan ekonomi; dan
- d. penerapan larangan kepada berbagai macam kegiatan keuangan dan pembatasan lainnya, termasuk beberapa diantaranya adalah:
 - i. memblokir pinjaman oleh institusi keuangan internasional
 - ii. penolakan perlakuan bebas bea untuk barang diekspor ke Amerika Serikat
 - iii. Adanya otoritas untuk melarang setiap warga Amerika Serikat untuk terlibat dalam transaksi keuangan dengan pemerintahan yang masuk dalam

⁵⁰ Gladstone, R. (2017, September 26). *The New York Times*. Retrieved from North Korean Banks and Citizens Added to U.S. Sanctions List: <https://www.nytimes.com/2017/09/26/world/asia/north-korea-sanctions.html>

daftar terorisme tanpa lisensi Departemen Keuangan⁵¹.

Hari berikutnya pemerintah AS terus meningkatkan tekanan ekonomi kepada Korea Utara dengan menjatuhkan sanksi baru pada 13 entitas Korea Utara dan China, termasuk 3 perusahaan perdagangan Cina, orang-orang berkebangsaan Cina, dan 20 kapal Korea Utara. Hal ini dilakukan mengingat pemerintahan Korea Utara memiliki basis maritim yang kuat yang dikenal dengan nama *North Korea Maritime Administration Bureau*. Dengan adanya sanksi tersebut, perusahaan pelayaran dan kapal-kapal milik Korea Utara menjadi target baru atas penerapan sanksi tersebut yang juga bertujuan untuk memblokir perdagangan maritimnya⁵². Selanjutnya, para pejabat pemerintahan Amerika Serikat menegaskan bahwa Washington tidak akan melanjutkan kebijakan yang dapat menyebabkan adanya perubahan atau bahkan kolapsnya rezim Korea Utara melalui tindakan koersif. Dalam sebuah pernyataannya yang dikirimkan kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 2 Mei, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson sudah menyatakan prinsip-prinsip yang disebut dengan “*Four Nos*”, dimana dalam menghadapi Korea Utara tidak akan membuat suatu kebijakan yang dapat mengubah atau menyebabkan kolapsnya rezim yang ada; mempercepat reunifikasi Semenanjung Korea; atau pengerahan militer Amerika Serikat di Zona Demiliterisasi

⁵¹ *The U.S. Department of State, “Overview of State-Sponsored Terrorism.* United States of America.

⁵² Pennington, M. (2017, November 21). Retrieved from The Washington Times: <https://www.washingtontimes.com/news/2017/nov/21/us-announcing-new-nkorea-sanctions-after-terror-de/>

Korea Utara⁵³. Tillerson dan Menteri Pertahanan James Mattis dalam pernyataan lainnya kembali menegaskan prinsip ini dan menambahkan lagi prinsip lainnya untuk itu oleh dengan mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud untuk membuat warga Korea Utara berada dalam penderitaan yang panjang. Pemerintah Amerika Serikat sendiri mendapatkan dukungan dari pemerintahan Korea Selatan yang dinyatakan Presiden Moon Jae-in secara langsung dalam kunjungannya ke Washington D.C. pada tanggal 3 Juli 2017. Karena dirasa apa yang dilakukan pemerintahan Amerika Serikat sejalan dengan posisi Cina – dimana dalam hal penanganan masalah nuklir mereka memilih jalur dialog dan diplomasi – Beijing secara resmi menyambutnya dengan baik dan dilaporkan mendesak Korea Utara untuk meresponnya⁵⁴.

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Amerika Serikat dalam penggunaan strategi barunya dalam menghadapi Korea Utara adalah dengan menempatkan penekanan pada peran Cina dalam menggunakan "pengaruh diplomatik dan ekonominya terhadap Korea Utara" dengan tujuan untuk mengentikan program nuklir Korea Utara dan membuat mereka kembali ke meja perundingan. Seiring dengan berjalannya kebijakan ini, Washington pun mendesak Cina untuk menerapkan sanksi multilateral PBB secara maksimal kepada rezim yang berkuasa di Korea Utara, yaitu rezim Kim Jong-un.

⁵³ Tillerson, R. W. (2017). *Remarks to U.S. Department of State Employees*. Washington, DC: U.S. Department of State.

⁵⁴ Martina, M. (2017, August 3). *Reuters*. Retrieved from China welcomes U.S. seeking dialogue with North Korea: <https://uk.reuters.com/article/uk-northkorea-missiles-china/china-welcomes-us-seeking-dialogue-with-north-korea-idUKKBN1AJ0JS>

Hasilnya, Cina tampaknya mengubah beberapa sanksi yang ada di dalam kebijakannya terhadap Pyongyang dan pada akhirnya bersedia untuk menerapkan sanksi-sanksi yang berlaku di PBB. Salah satu buktinya adalah Cina melanjutkan untuk menangguhkan semua impor batubara dari Korea Utara sejak akhir Februari 2017 untuk menerapkan sanksi yang dikenakan oleh Resolusi 2321. Resolusi ini juga berisikan beberapa hal mengenai sanksi yang diterapkan kepada Korea Utara, diantaranya adalah:

- Menegaskan kembali kepada Korea Utara untuk tidak melanjutkan lebih jauh mengenai program nuklir dan rudal balistiknya serta menghentikan segala tindak provokasi dalam bentuk apapun;
- Negara-negara yang menjadi anggota PBB harus memutus segala bentuk kerja sama ilmiah dengan Korea Utara baik secara individual maupun kelompok, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan medis;
- Negara-negara yang menjadi anggota PBB diharuskan untuk melarang Korea Utara menggunakan berbagai macam properti yang dimiliki atau disewakan di wilayah mereka untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan konsuler atau diplomatik;
- Negara-negara anggota harus melarang pengadaan kapal dan layanan awak pesawat dari Korea Utara dan diharuskan melakukan registrasi ulang dari setiap kapal yang dimiliki, dikontrol, atau dioperasikan oleh Korea Utara;
- Memutuskan bahwa Korea Utara tidak akan memasok, menjual atau mentransfer secara langsung atau tidak; dari wilayahnya atau oleh warga negaranya atau menggunakan kapal-kapalnya atau pesawat, batu bara,

besi, dan bijih besi; dan semua negara anggota harus melarang pengadaan bahan tersebut dari Korea Utara oleh warga negara mereka, atau menggunakan property apapun yang berkaitan dengan Korea Utara baik itu berada di wilayah mereka maupun tidak; dan lain-lainnya⁵⁵.

Apa yang dilakukan oleh Cina pada penjabaran sebelumnya sekali lagi merupakan tindakan yang diambil untuk menghentikan segala kegiatan Korea Utara yang berhubungan dengan program nuklirnya. Batubara sendiri diyakini merupakan komoditas ekspor utama dari Korea Utara. Menurut perhitungan dari *Korea Trade-Investment Promotion Agency* (KOTRA), batubara menyumbang rata-rata sepertiga dari total pendapatan ekspor Korea Utara dalam rentang waktu 2010-2015. Selain itu, menurut data statistik impor yang tersedia melalui *Global Trade Atlas*, kegiatan ekspor batubara Korea Utara menghasilkan lebih dari \$ 1 miliar pendapatan untuk Pyongyang setiap tahun dalam periode ini, dan lebih dari 97% dari kegiatan ekspor tersebut ditujukan ke Cina⁵⁶. Meskipun penegakkan sanksi PBB tersebut sudah dilakukan oleh Cina, ekonomi Korea Utara belum terpengaruh dan dengan demikian penerapan sanksi yang ada dinyatakan belum efektif.

Dalam menghadapi dua tes Rudal Balistik Antar Benua (ICBM) di Pyongyang pada bulan Juli, Beijing juga memainkan sebuah peran aktif dalam mengadopsi Resolusi 2371. Resolusi

⁵⁵ (2016). *Resolution 2321*. United States of America: Security Council of United Nation.

⁵⁶ Lawrence, S. V., Manyin, M. E., & Hammond, K. A. (2017). *China's February 2017 Suspension of North Korean*. CRS INSIGHT.

baru ini dikerjakan sebagai hasil dari negosiasi yang cukup serius dan berlangsung selama beberapa minggu antara Washington dan Beijing. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menyebutkan bahwa pemerintahannya akan berkomitmen untuk memberlakukan sanksi baru meskipun Cina harus menanggung resiko yang akan muncul, yaitu hubungan ekonomi antara negaranya dengan Korea Utara. Beijing sendiri mulai menerapkan sanksi baru dibawah Resolusi 2371 pada tanggal 15 Agustus 2017 ketika Pemerintahan Tiongkok mengeluarkan larangan impor yang dikenakan pada komoditas batubara, besi, bijih besi, timbal, dan makanan hasil olahan laut dari Korea Utara. Daftar komoditas tersebut mencakup sebagian besar komoditas yang diimpor Cina pada saat itu. Pengumuman dari penerapan sanksi tersebut juga mengatakan impor barang yang tiba di China sebelum 14 Agustus akan diizinkan, dan prosedur impor apa pun tidak akan diizinkan lagi mulai tengah malam pada tanggal 5 September. Selain itu, untuk segala jenis bisnis di Cina yang melakukan impor batubara dan barang-barang lainnya melalui Pelabuhan Rajin di Korea Utara, langkah-langkah yang bisa diambil oleh perusahaan adalah meyakinkan Komite Sanksi Korea Utara dari PBB bahwa barang-barang yang mereka impor bukan berasal dari Korea Utara⁵⁷. Untuk mendorong Beijing memainkan peran yang lebih aktif dalam menyelesaikan masalah nuklir Korea, Presiden Trump dilaporkan menawarkan Presiden China Xi Jinping insentif perdagangan yang lebih menguntungkan sebagai imbalan atas peran tegas Beijing dalam menangani

⁵⁷ Oi-hyun, K. (2017, August 15). *Hankyoreh*. Retrieved from China to ban North Korean coal and iron imports from August 15th: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/806876.html

permasalahan nuklir tersebut. Hal ini disampaikan oleh Trump pada pertemuan puncak mereka di bulan April 2017.

Sebagai tambahan dan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, para pembuat kebijakan di Amerika Serikat menegaskan tidak akan membuat suatu kebijakan yang dapat mengubah tatanan rezim Korea Utara atau bahkan menghancurkannya, serta tidak akan mengirimkan militer mereka ke Zona Demiliterisasi. Kebijakan yang dikenal dengan nama “*Four Nos*” ini merupakan sebuah insentif bagi Beijing untuk mendorong mereka agar tidak perlu khawatir akan ketidakstabilan dan keruntuhan yang mereka perkirakan akan terjadi pada rezim yang ada. Berkaitan dengan *carrot and stick diplomacy* yang diterapkan oleh Amerika Serikat, dalam hal ini Washington menggunakan “*stick*” nya untuk menekan Beijing agar terus mengekang Pyongyang. Sebagai penerapannya, pada bulan Juni, Departemen Keuangan menjatuhkan hukuman tambahan terhadap perusahaan pelayaran, bank, dan dua orang yang berasal dari Cina disebabkan oleh adanya hubungan keuangan mereka dengan Korea Utara. Sekretaris Keuangan Amerika Serikat Steve Mnuchin mengatakan bahwa sanksi yang mereka terapkan merupakan usaha yang lebih besar untuk memblokir jalur keuangan yang digunakan Korea Utara dalam mengembangkan program nuklirnya. Sanksi baru melarang perusahaan *Dalian Global Unity Shipping* dan dua warga, Sun Wei dan Li Hong Ri, dari melakukan bisnis dengan perusahaan dan individu yang terkait dengan Amerika Serikat. Tetapi, target utama mereka adalah *Bank of Dandong*, yang sekarang terputus dari sistem keuangan AS menyusul bukti adanya kegiatan keuangan ilegal Korea Utara, termasuk pencucian uang⁵⁸. Terlebih lagi, adanya perintah naru yang dikeluarkan

⁵⁸ Bendix, A. (2017, June 29). *U.S. Sanctions Chinese Entities With Financial Ties to North Korea*. Retrieved from The Atlantic:

tatanan administratif Presiden Trump pada tanggal 21 September yang dimana tujuan utamanya adalah menerapkan sanksi terhadap lembaga keuangan asing memiliki transaksi perdagangan yang signifikan dengan Korea Utara, ditafsirkan berbeda yang bertujuan untuk menekan Tiongkok agar membatasi bank-banknya dari melakukan transaksi dengan Korea Utara. Langkah yang diambil oleh Departemen Keuangan AS pada tanggal 26 September untuk menunjuk delapan bank Korea Utara dan dua puluh enam warga Korea Utara yang masuk dalam daftar sanksi *blacklist* di negara mereka juga diyakini untuk mengekang transaksi keuangan Cina dengan Korea Utara.

Langkah berikutnya yang diterapkan dari kebijakan “*strategic accountability*” ini adalah dengan memperkuat pertahanan dan kesiapan militer melalui kerja sama yang erat dengan Korea Selatan dan Jepang untuk mencegah dan menanggapi provokasi Korea Utara, seperti penyebaran *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di Korea Selatan, penempatan aset strategis AS ke Semenanjung Korea, dan peningkatan latihan militer bersama. Kebijakan ini juga sejalan dengan paham realis dimana terdapat kerjasama keamanan dengan sekutu untuk menghadapi musuh mereka secara efektif. Pada bulan Juni 2016, Amerika Serikat dan Korea Selatan sepakat untuk menyebarkan sistem THAAD mereka yang ditujukan untuk mencegah rudal balistik Korea Utara. Sebagai tanggapan atas peluncuran empat rudal balistik Korea Utara pada 6 Maret 2017, pada hari berikutnya militer Amerika Serikat mulai menggunakan sistem THAAD mereka

<https://www.theatlantic.com/news/archive/2017/06/us-sanctions-chinese-entities-over-ties-to-north-korea/532317/>

di pangkalan pertahanan rudal barunya di Seongju, sekitar 300 kilometer di bagian selatan Seoul, Korea Selatan. Selanjutnya, dalam menghadapi peningkatan ancaman keamanan dari Korea Utara yang disebabkan oleh dua pengujian Rudal Balistik Antar Benua (ICBM) pada bulan Juli serta adanya pengujian nuklir ke-enam pada tanggal 3 September yang juga digunakan untuk meledakkan bom hidrogen mereka, pada tanggal 7 September Amerika Serikat telah menyelesaikan pemasangan sistem THAAD mereka yang terdiri dari enam peluncur roket dan radar *X-band* yang sangat kuat untuk menghadapi ancaman Korea Utara tersebut⁵⁹. Sementara itu, penyebaran THAAD telah menghadapi oposisi yang kuat dari Beijing. Pemerintahan Cina menganggapnya sebagai perusak kepentingan keamanan Cina karena mereka khawatir tentang kemungkinan bahwa Amerika Serikat dapat memanfaatkan radar THAAD di Korea Selatan untuk mendeteksi dan melacak sistem rudal China sendiri untuk melemahkan postur pertahanan nuklir dari militer China. Selain itu, mereka ragu apakah Amerika Serikat bermaksud untuk membawa Korea Selatan melalui pengerahan THAAD ke dalam sistem pertahanan misilnya di Timur Laut Asia dan terdapat Cina di dalamnya di masa depan. Menanggapi pertentangan Beijing, pejabat AS menekankan bahwa instalasi sistem THAAD di Korea Selatan merupakan persiapan defensif melawan ancaman akut tindakan militer yang ditujukan kepada Amerika Serikat, sekutu, dan negara lainnya. Dengan demikian, mereka mengkritik permintaan Cina untuk tidak menyebarkan THAAD sebagai sesuatu yang "tidak realistis." Masalah THAAD telah menjadi salah satu hambatan yang harus

⁵⁹ Ji-hye, J. (2017, September 9). *4 more THAAD launchers to be deployed Thursday*. Retrieved from The Korea Times: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/09/205_236100.html

dihadapi oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan melalui diplomasi yang melibatkan Cina untuk menekan Korea Utara agar mengubah perilaku provokatifnya. Sebagai tindakan balasan terhadap pengerahan THAAD di Korea Selatan, Beijing secara tidak resmi mengenakan sanksi terhadap perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Tiongkok dan membatasi turis Cina ke Korea Selatan, yang telah menyebabkan ketegangan dalam hubungan bilateral.

Pada akhir September, Korea Selatan dan Cina secara tak terduga mencapai kesepakatan untuk memulihkan hubungan mereka melalui pembicaraan tingkat tinggi. Pada saat itu pula, sebagai imbalan untuk konsesi Beijing yang sudah mengerahkan Sistem THAAD, Seoul memberikan jaminan yang dikenal dengan “*three no’s*”: tidak ada tambahan pengerahan THAAD; tidak ada partisipasi dalam sistem pertahanan rudal AS dan tidak ada pembentukan aliansi trilateral dengan AS dan Jepang. Namun demikian, masalah ini belum sepenuhnya terselesaikan. Ini karena Beijing menuntut jaminan bahwa sistem THAAD tidak akan melanggar kebijakan mengenai kepentingan keamanan negaranya secara teknis, sementara Seoul telah meminta pencabutan sanksi dan pembatasan. Pembicaraan bilateral secara lebih lanjut pun diharapkan untuk digelar dalam rangka pembahasan isu ini secara lebih lanjut. Apalagi, militer Amerika Serikat pun telah secara rutin melakukan unjuk kekuatan besar-besaran terhadap Korea Utara dengan menyebarkan aset strategisnya, seperti kapal induk, kapal selam tenaga nuklir, pembom strategis, jet tempur, dan pasukan militernya ke Semenanjung Korea untuk melakukan latihan militer dengan pasukan Korea Selatan dalam rangka memperkuat gabungan pertahanan dan kesiapan militer untuk mengatasi provokasi Korea Utara.

Akhirnya, kebijakan baru yang diterapkan oleh Pemerintahan Trump ini atau yang dikenal dengan “*strategic*

accountability” mencari keterlibatan dengan Utara Korea dengan syarat bahwa mereka akan menghentikan tindakan provokatifnya, seperti uji coba nuklir dan peluncuran uji misil. Mengikuti kebijakan ini, Sekretaris Negara Tillerson dan pejabat tingkat tinggi AS lainnya telah menegaskan kembali bahwa Washington bersedia memulai negosiasi dengan Pyongyang dan Korea Utara perlu menghentikan peluncuran misil dan uji coba senjata nuklirnya agar negosiasi dapat dimulai. Ketika Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk memberikan sanksi terberat kepada Korea Utara atas pengujian nuklirnya yang ke-enam pada bulan September, Duta Besar Amerika Serikat Nikki Haley menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak menginginkan terjadinya perang dengan Korea Utara dan juga menyatakan bahwa Pyongyang “belum melewati titik batas untuk tidak bisa kembali seperti awal lagi.”⁶⁰ Departemen Luar Negeri juga menegaskan kembali tentang usaha Washington untuk "menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi" jika rezim komunis menunjukkan "sebuah ketertarikan pada keterlibatan serius" seperti penghentian tindakan provokatifnya. Pernyataan ini menunjukkan kesediaan pemerintah Amerika Serikat untuk terlibat secara kondisional dengan Korea Utara. Sementara tidak ada tanda-tanda mengenai agenda khusus apa pun yang terkait dengan persoalan negosiasi, Pemerintahan Trump menyarankan bahwa mereka akan mengurus segala hal yang berkaitan dengan bantuan ekonomi dan jaminan keamanan untuk rezim Korea Utara. Kebijakan ini juga konsisten dengan sikap realis berdasarkan perjanjian diplomasi wortel dan tongkat. Namun demikian,

⁶⁰ Haley, N. (2017). *Remarks Following the Adoption of UN Security Council Resolution 2375 on North Korea Sanctions*. New York: U.S. Mission to the United Nations.

Washington sangat bergantung pada strategi pemberian tekanan karena tindakan provokatif Pyongyang yang berulang tanpa sedikitpun menunjukkan adanya perubahan.

Singkatnya, kebijakan baru yang diterapkan Trump dianggap sebagai sebagian besar pihak berasal dari aliran pemikiran realis. Penekanannya ditegaskan pada adanya tekanan dan sanksi yang sejalan dengan tindakan realis dalam mengambil langkah-langkah hukuman yang diberikan terhadap rezim yang bermusuhan sebagai bagian dari diplomasi wortel-dan-tongkat, dalam menghadapi sikap mereka yang sulit diajak bekerjasama dan provokasi yang mereka lakukan secara terus-menerus. Kebijakan yang diambil untuk memperkuat pencegahan dengan mempersiapkan kekuatan militer yang bekerjasama dengan Korea Selatan juga konsisten dengan logika realis yang mendukung kerjasama erat dengan sekutu untuk secara efektif menghadapi negara-negara yang bermusuhan. Di sisi lain, itu pemerintahan Trump pun telah melakukan diplomasi multilateral dan menerapkan sanksi yang berlaku melalui Dewan Keamanan PBB. Fokusnya pada pendekatan multilateral yang memanfaatkan PBB sesuai dengan resep internasionalis liberal. Selain itu, perkembangan lain yang terjadi pada masa Pemerintahan Trump dengan penerapan strateginya adalah adanya beberapa sikap yang ditunjukkan oleh Korea Utara. Dalam pidato tahunannya untuk menyambut Tahun Baru 2019, Kim Jong Un mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan lagi mengembangkan, menggunakan, dan menyebarkan program nuklirnya yang selama ini menimbulkan keresahan di dunia internasional. Kim pun menyatakan keterbukaan Korea Utara untuk duduk kembali bersama Presiden Amerika Serikat (dalam hal ini Donald Trump) setelah sebelumnya kedua pemimpin ini bertemu di Singapura untuk membahas sesuatu yang dapat menghasilkan output yang dapat diterima oleh komunitas internasional. Namun di lain sisi, Kim pun tetap menegaskan bahwa jika

Amerika Serikat memaksakan hal-hal yang dapat mengancam kestabilan rakyat Korea Utara dan juga menerapkan banyak tekanan dan sanksi, maka Korea Utara akan “mencoba jalur yang baru” dalam rangka untuk melindungi kedaulatan mereka serta menciptakan kedamaian di Semenanjung Korea. Kim pun menjelaskan hal-hal yang terkait dengan hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan, yaitu mengenai upaya mereka untuk membina hubungan yang menciptakan kedamaian dan kemakmuran dengan Korea Utara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melarang pasukan dari kedua negara untuk melakukan latihan militer gabungan dengan pasukan dari wilayah lain diluar Semenanjung Korea serta larangan untuk menyebarkan aset-aset persenjataan dari kedua negara di wilayah Semenanjung Korea ini⁶¹.

Namun, penerapan strategi ini pun juga tidak selalu berjalan mulus. Pada 12 Juni 2018, Presiden Trump dan Kim bertemu di Singapura untuk membahas program nuklir Korea Utara, membangun rezim perdamaian di Semenanjung Korea, dan masa depan hubungan AS dengan Korea Utara. Setelah KTT, Trump dan Kim mengeluarkan pernyataan bersama yang disampaikan secara singkat dimana Trump "berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan kepada DPRK," dan Kim "menegaskan kembali sikapnya dan komitmen teguh untuk menyelesaikan denuklirisasi Semenanjung Korea". Jika ditinjau, Dokumen Singapura memiliki ukuran ayng lebih pendek pada rincian daripada perjanjian nuklir sebelumnya dengan Korea Utara dan Korea bertindak sebagai pernyataan prinsip dalam empat bidang berikut:

- Normalisasi. Kedua belah pihak “berkomitmen untuk membangun” hubungan bilateral baru.

⁶¹ News, G. (31, December 2018). Kim Jong-un's new year message.

- Perdamaian. Amerika Serikat dan DPRK sepakat untuk bekerja sama dalam membangun rezim perdamaian yang stabil dan abadi.
- Denuklirisasi. Korea Utara “berkomitmen untuk bekerja sepenuhnya dalam melaksanakan denuklirisasi di Semenanjung Korea”.
- POW / MIA akan tetap ada. Kedua belah pihak akan bekerja untuk memulihkan sisa-sisa ribuan pasukan A.S. yang tidak diketahui selama Perang Korea.

Perjanjian tersebut tidak menyebutkan program rudal balistik DPRK. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan negosiasi lanjutan yang dipimpin oleh pihak Amerika Serikat, yaitu Sekretaris Negara Mike Pompeo. Dalam konferensi pers yang tersedia setelah pertemuan puncak itu terjadi, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menunda latihan militer tahunan AS-Korea Selatan, yang disebut Trump sebagai "permainan perang" dan "provokatif." Trump juga menyatakan harapan akhirnya menarik sekitar 30.000 tentara AS yang ditempatkan di Korea Selatan. Seminggu setelah pertemuan puncak, Departemen Pertahanan mengumumkan bahwa latihan tahunan "*Ulchi Freedom Guardian*" AS-Korea Selatan yang dijadwalkan untuk bulan Agustus menjadi dibatalkan. Banyak analis mengamati bahwa perjanjian tersebut mencakup wilayah yang telah dimasukkan sebelumnya di dalam perjanjian dengan Korea Utara, meskipun perjanjian itu tidak dibuat oleh pemimpin DPRK sendiri. Pendukung perjanjian menunjukkan bahwa penangguhan uji coba rudal dan nuklir akan mengurangi kemampuan Korea Utara untuk lebih meningkatkan kemampuannya. Pengkritik perjanjian menunjukkan kurangnya kerangka waktu atau referensi ke mekanisme verifikasi untuk proses denuklirisasi, serta kurangnya komitmen oleh Kim untuk membongkar program denuklirisasi rudal balistik DPRK serta

pembentukan rezim perdamaian, dan normalisasi hubungan diplomatik.

Setelah melakukan pertemuan di Singapura pada tahun 2018, kedua pemimpin ini akhirnya kembali bertemu pada Februari 2019 silam di Hanoi, Vietnam. Alasan mengapa pertemuan dilakukan di negara ini adalah adanya kesamaan latar belakang ideologi politik yang dianut dengan Korea Utara, yaitu komunis. Di sisi lain, Vietnam pun pernah mengalami permasalahan yang cukup serius dengan Amerika Serikat. Pada pertemuan ini, perundingan yang terjadi diantara keduanya tidak menghasilkan kesepakatan apapun alias nihil. Amerika Serikat dikabarkan menolak permintaan Korea Utara untuk mencabut semua sanksi yang dikenakan kepada mereka. Amerika tentu saja menolak permintaan tersebut. Berdasarkan salah satu analisis yang dilakukan oleh Katharine Moon dari Brookings Institution, ketidaksepakatan mengenai pelanggaran sanksi kemungkinan menggambarkan keterbatasan diplomasi pribadi Trump, yakni berusaha menjalin persahabatan dengan Kim untuk memperoleh konsesi⁶². Di Hanoi, kedua pemimpin itu tadinya diperkirakan akan menyepakati langkah-langkah konkrit seperti perlucutan fasilitas nuklir Yongbyon yang memproses bahan bakar plutonium, dan akan memperbaiki hubungan dengan menandatangani deklarasi perdamaian. Perundingan-perundingan menjelang KTT itu juga tampaknya mengindikasikan kesediaan Washington untuk mengompromikan tuntutan lamanya.

⁶² Padden, B. (2019, March 1). *VOA Indonesia*. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/analisis-kegagalan-ktt-hanoi-bisa-hasilkan-pembicaraan-nuklir-produktif/4809172.html>